

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PEMANCINGAN NUSANTARA DI DESA API-API KECAMATAN WARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**Rahmaidah¹, Dr. Muh.Jamal Amin, M.Si,² Hj. Letizia Dyastari, S. Sos,
M.Si³**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Parawisata dalam pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara, mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Narasumber terdiri dari Kepala DISBUDPAR Kabupaten Penajam Paser Utara, Pengelola Objek Wisata Pemancingan Nusantara, Pengunjung atau wisatawan, serta masyarakat. Temuan dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara dapat dikatakan masih dalam tahap pembangunan, yang memiliki potensi sumberdaya alam yang masih asri dengan kekayaan flora dan fauna yang ada di objek wisata tersebut. Selain itu, memiliki daya tarik dengan penawaran sensasi memancing ditengah laut. Hal ini tidaklah lepas dari peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta adanya peran dari pengelola objek wisata tersebut dalam berpartisipasi untuk pengelolaan objek wisata tersebut. Walaupun dalam pengelolaan objek wisata pemancingan nusantara tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan yang harus dihadapi, selain dari sarana dan prasarana yang tersedia dan juga kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci: *Peran, DISBUDPAR, pengelolaan, objek, wisata*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahmarahmidah@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi kekayaan alam yang merupakan modal dasar bagi dunia kepariwisataan yang dapat dijadikan sebagai tempat objek wisata yang patut untuk dibanggakan terlebih objek wisata pantai dan lautnya, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai garis pantai yang panjang.

Potensi kekayaan alam apabila dikelola atau dimanajemen dengan baik akan memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian pembangunan daerah. Banyak negara-negara di dunia yang memiliki organisasi kepariwisataan (*national tourism board*) yang didanai oleh pemerintah untuk mempromosikan kegiatan kepariwisataannya secara internasional.

Menurut Fred Wibowo (2007:86) Pariwisata adalah komoditi utama non-migas yang dewasa ini menjadi trend dunia. Objek yang menjadi aset wisata dipelihara dan diperlakukan dengan cara yang sangat istimewa. Tentu saja karena perlakuan yang istimewa itu, objek wisata tersebut menjadi sangat terpelihara. Ini adalah segi yang positif dari pariwisata yang sungguh memperhatikan kepentingan pelestarian dari objek yang menjadi asetnya.

Dalam upaya mempercepat perkembangan desa, pembangunan dan pembinaannya perlu mendapat perhatian semua pihak. Dengan cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di desa. Sumberdaya yang ada diupayakan penggunaannya secara optimal sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai pula.

Sektor Pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas pengembangan bagi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata yaitu undang-undang nomor 10 bab 7 Pasal 18 tahun 2009 yang berbunyi “ Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan pengelolaan potensi objek wisata menurut Ricardson dan Fluker (dalam Ardian Prayoga Aditya, 2010:2) yang diluncurkan tahun 1995 oleh *The Pacific Asia Travel Association (PATA)*, adalah:

1. Memenuhi kebutuhan konsumen
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional Negara Indonesia
3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan
4. Menyediakan pengembalian financial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata

Adapun tempat penelitian di dalam penelitian ini adalah Desa Api-api kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan daerah daratan rendah yang berada dekat dengan selat Makasar.

Dinas Pariwisata sangat berperan dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara yang terletak di Desa Api-api Kecamatan Waru

Kabupaten Penajam Paser Utara karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek wisata tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas Pariwisata membuat berbagai program-program untuk meningkatkan kualitas objek Wisata Pemancingan Nusantara sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat, selain itu Dinas Pariwisata juga dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Desa serta warga desa tersebut.. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap objek wisata tersebut.

Pada kesempatan ini penulis mencoba mengangkat judul tentang “ Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara Di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara”. Penulis ingin mengetahui sejauh mana peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan salah satu objek wisata yang ada di Desa Api-api yaitu Pemancingan Nusantara.

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki banyak daya tarik wisata alam pesisir salah satunya adalah wisata Pemancingan Nusantara yang ada di Kecamatan Waru, Desa Api-api yaitu Wisata Pemancingan Nusantara. Objek wisata ini sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disekitarnya. Objek wisata ini hampir pernah dijadikan sebagai objek wisata unggulan oleh pemerintah daerah. Karena tidak hanya Pantainya yang menarik tetapi juga memiliki berbagai jenis biota laut, kemudian juga merupakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta tempat pengembangbiakan Rumput Laut, pelestarian hutan mangrove dan berpotensi sebagai wilayah edukasi laut serta kesenian dan kebudayaan masyarakat setempat. Tetapi, begitu banyak kekurangan yang masih dimiliki oleh objek wisata tersebut terutama mengenai sarana dan prasarana juga belum tersentuh program pembangunan infrastruktur (jalan) secara maksimal serta tidak bisa dijadikan jaminan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar tempat Objek Wisata Pemancingan Nusantara.

Sebagai contoh, Pertama: Pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan tempat Objek Wisata Pemancingan Nusantara dengan jalan utama atau jalan Provinsi, terdapat dua jalan penghubung yaitu Jalan Nelayan dan Jalan Gelora. Faktanya bahwa kualitas pembangunan jalan tidak baik, karena bila di jalan Nelayan masih banyak jalan yang berlubang dan sebagian jalan merupakan batuan kerikil. Kemudian, bila di jalan Gelora pembangunan jalan semenisasi belum ada sama sekali. Jadi, apabila hujan jalan tersebut tidak dapat digunakan walaupun jalan ini merupakan jalur yang paling dekat dengan Pantai. Kedua: Pembangunan sarana dan prasarana air bersih masih minim di Desa Api-api tidak ada PDAM mayoritas masyarakatnya hanya menggunakan air sumur atau air bor, tetapi permasalahannya untuk daerah masyarakat pantai kualitas air sumur tidak bagus sehingga tidak dapat digunakan. Jadi, untuk mendapatkan air bersih masyarakat pesisir pantai menggunakan energi Matahari yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya itupun pembagian airnya dijatah untuk beberapa rumah per harinya. Ketiga: Untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara

masyarakat pesisir dituntut untuk mengembangkan produk makanan khas Penajam Paser Utara, tetapi masyarakat pesisir pantai lemah dalam hal pemasaran produk. Hanya bila ada acara tahunan pantai yaitu Pesta Pantai barulah masyarakat pesisir dapat memasarkan produknya. Selain itu, masyarakat pesisir juga dituntut untuk meningkatkan kreativitas dalam bidang budaya tradisional untuk menambah daya tarik wisata Pemancingan Nusantara, untuk masyarakat asli Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Suku Paser dan mayoritas masyarakat Pesisir Pantai adalah Suku Bugis, sehingga terdapat dua kebudayaan yang harus ditonjolkan di Desa tersebut. Tetapi kelemahan masyarakat pesisir adalah sumberdaya manusianya masih lemah dibidang kebudayaan tradisional. Mayoritas masyarakatnya tidak bisa memainkan alat musik tradisional dan menari tarian tradisional suku mereka. Pemerintah pun belum bisa mengadakan tenaga ahli dibidang kebudayaan tersebut. Keempat: dalam pengelolaannya dibangun beberapa rumah pemancingan atau rombongan yang terletak ditengah laut tapi ini beberapa masih dalam proses pembangunan. Kemudian jembatan yang dimiliki oleh objek wisata ini mengalami kerusakan dan belum dibenahi. Karena merupakan area pantai objek wisata ini memiliki berbagai potensi-potensi sumberdaya. Adapun potensi sumberdaya yang ada di Objek wisata Pemancingan Nusantara adalah:

1. Berbagai jenis potensi perikanan
Jenis ikan yang berada di di perairan desa Api-api terdapat 60 jenis yang terdiri dari jenis ikan pelagis dan jenis ikan demersal.
2. Pengembangbiakan rumput laut
Salah satu kegiatan perikanan yang dilakukan masyarakat desa Api-api adalah melakukan pengembangbiakan rumput laut.
3. Pelestarian hutan mangrove
Pelestarian hutan mangrove sebagai upaya mitigasi bencana melalui pemulihan ekosistem .
4. Berpotensi sebagai wilayah edukasi laut
Sebagai tempat penelitian berbagai jenis biota laut seperti berbagai jenis produk perikanan, penelitian hutan mangrove dan sebagainya.

Dari beberapa uraian masalah diatas, inilah yang menyebabkan Penulis ingin melakukan penelitian di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, sehingga pada suatu saat nanti pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api dapat membuahkan kemajuan untuk masyarakat tidak hanya masyarakat Pesisir Pantai tetapi juga seluruh masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Menurut Poerwadarmita (dalam Sabarianto, 2010: 12), Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif. Syahril Syarbaini (2009:34) mengatakan bahwa peran atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yakni pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kedudukan.

Dalam hal ini seseorang akan bersikap menurut aturan main dan nilai-nilai yang dijunjung.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengertian Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Pemerintah menurut W. S. Sayre (dalam Inu Kencana Syafi'ie, 2007:05) adalah *Government is best defined as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*. (maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah dibantu oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing di setiap SKPD. Salah satu SKPD yang melaksanakan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2016 dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata, serta tugas-tugas sekretariat.
3. Pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian tugas satuan kerja
4. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pemerintah, Pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

Fungsi pemerintah menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2005:22) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

World Bank (dalam Ernani Rustiadi, 2011: 459) menawarkan paradigma pembangunan yang berkaitan dengan pembatasan fungsi-fungsi pemerintah dan dihubungkan dengan paradigma pembangunan ini membatasi fungsi pemerintah dalam tiga fungsi pokok, yaitu fungsi minimal, fungsi fasilitas dan fungsi aktif masing-masing fungsi tersebut dijalankan tergantung dan berdasarkan kapasitas pemerintah.

Menurut Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri (2010:278) Fungsi pembangunan yang membuahkan kemakmuran. Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan dirumuskan dalam tiga kebijakan strategis yang terintegrasi, yakni kebijakan ekonomi, kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan, dan kebijakan kelembagaan.

Menurut Thamrin. B. Bachri (dalam Muljadi A. J, 2009:92) bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan Indonesia seperti yang dirasakan sekarang ini ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu:

1. Keberhasilan dalam pemasaran.
2. Keberhasilan dalam pengembangan produk.
3. Keberhasilan menciptakan sumberdaya manusia (SDM) pariwisata.

Pengelolaan

Dalam bahasa Inggris pengelolaan adalah management yang artinya pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan pengemudian.

Pengelolaan (manajemen), menurut Leiper (dalam I Gde Pitana, 2009:80), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi –fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Directing* (mengarahkan)
3. *Organizing* (termasuk *coordinating*)
4. *Controlling* (pengawasan)

Ismail Solihin (2010:04) mengatakan bahwa Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi manajemen tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses. Artinya, seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan

kedalam empat fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara kepada pencapaian tujuan.

Objek Wisata

Objek wisata menurut Fandeli (dalam Ardian Prayoga Aditya, 2010:22) adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata bagi wisatawan untuk dikunjungi wisatawan. Menurut Gamal Suwanto (2004: 19) daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata.

Menurut Laila Nagib,dkk (2003:02) Industri pariwisata merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi, karenanya berperan strategis dalam menangani permasalahan ekonomi maupun sosial. kegiatan pariwisata di suatu wilayah biasanya bergerak cepat dan dinamis dan memiliki *multiplier effect* yang cukup besar terhadap perkembangan sektor lainnya terutama sektor perindustrian, perdagangan tenaga kerja dan pendidikan. Hal ini berarti dapat mendorong penciptaan lapangan kerja diberbagai sektor perekonomian. Di sisi lain kegiatan pariwisata juga sangat rentan dan rapuh terhadap berbagai isu dan kejadian baik bidang keamanan, kesehatan maupun lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2012:13) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2010:06) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini lebih kepada pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi:
 - a. Perencanaan sarana wisata dan prasarana wisata
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan objek wisata
 - c. Pengawasan terhadap objek wisata
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil Penelitian

Dalam suatu proses pengelolaan objek wisata sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan semua stakeholder mulai dari Pemerintah Daerah, Dinas Kebudayaan dan pariwisata, masyarakat dan pengunjung. Hal ini dilakukan demi berjalannya pengelolaan yang diharapkan bisa menghasilkan sesuatu kemajuan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak maka dapat memberikan nilai lebih terhadap wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pemancingan Nusantara sehingga hasil yang diharapkan nantinya adalah peningkatan pengunjung dari tahun-ketahun.

Pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk mengelola potensi-potensi wisata daerah yang ada dengan menekankan nilai-nilai kelestarian alam, sosial dan budaya. Untuk suatu pengelolaan yang baik maka juga diperlukan manajemen yang baik dan efisien memerlukan orang-orang yang ahli dibidangnya yang akan mengelola objek wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api.

Perencanaan Sarana Wisata dan Prasarana Wisata

Dalam melakukan sebuah perencanaan untuk mengelola objek wisata maka yang harus dilakukan pertama kali ialah mengetahui potensi-potensi wisata dan mengetahui karakteristik objek wisata yang ada. Pemancingan Nusantara adalah suatu objek wisata alam yang memiliki karakteristik objek wisata pemancingan ditengah laut dan memiliki pemandangan yang indah serta asri juga dengan areal wisata yang cukup luas. Sarana dan prasarana wisata penting dalam perencanaan karena merupakan akses jalan untuk para pengunjung ke lokasi objek wisata, untuk sampai di area wisata pemancingan nusantara pengunjung dapat menempuh perjalanan yang tidak jauh dari jalan raya. Dari jalan raya letaknya hanya 1 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Untuk menuju lokasi objek wisata dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil dapat ditempuh sekitar 1 jam dari penajam atau sekitar 30 km dari pelabuhan penajam. Akses jalan masuk ke lokasi objek wisata memiliki 2 jalan, yang pertama adalah jalan nelayan dan yang kedua adalah jalan gelora yang mana kedua jalan tersebut masih merupakan jalan tanah dan berbatu sehingga masih ada jalan yang rusak terlebih pada saat musim hujan. Sehingga untuk masuk ke lokasi objek wisata akses jalannya belum dirasa nyaman oleh para pengunjung.

Setelah mengetahui karakteristik objek wisata yang ada barulah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun anggaran yang akan diprogramkan untuk pengelolaan objek wisata tersebut. Anggaran yang diprogramkan akan disusun dalam Renstra atau Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata pemancingan nusantara.

Sehingga membuat pembangunan dan perbaikan didalam pengelolaan objek wisata tidak berjalan dengan optimal. Kemudian selanjutnya adalah tahap pelaksanaan tentang apa yang akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Pemeliharaan Objek Wisata

Untuk pelaksanaan pemeliharaan objek wisata diperlukan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. Tetapi, hal ini masih menjadi penghambat dalam implementasinya karena keterbatasan sumberdaya manusia yang mampu mengelola objek wisata Pemancingan Nusantara dengan baik agar terwujudnya tujuan yang diharapkan.

Pemeliharaan objek wisata meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, pemeliharaan kebersihan tempat wisata dan pemeliharaan kelestarian flora dan fauna yang ada. Pemeliharaan objek wisata dilakukan dengan adanya alokasi dana dari pemerintah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kemudian adanya peraturan yang dibuat untuk menjaga dan memelihara kebersihan objek wisata, selain itu juga harus adanya kesadaran dari para pengunjung untuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan wisata. Sehingga tidak terjadi kerusakan pada objek wisata.

Pengawasan terhadap Objek Wisata

Didalam pengelolaan objek wisata pengawasan merupakan hal yang penting, karena merupakan suatu hal yang dapat menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan baik itu yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun masyarakat yang terlibat didalamnya berjalan dengan baik, agar seluruh kegiatan yang sedang dilakukan terjamin bahwa semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengajak masyarakat dan pengunjung untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar kesejahteraan dapat terwujud. Antusias masyarakat dan pengunjung dalam melakukan pengawasan dengan baik dalam mengawasi dan melestarikan objek wisata Pemancingan Nusantara merupakan suatu dukungan dalam pengelolaan objek wisata pemancingan nusantara di desa api-api. Pengawasan terhadap objek wisata dilakukan untuk mengontrol Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata, selain itu juga mengawasi perilaku pengunjung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini yang mengawasi adalah semua pihak baik pemerintah bersama dinas pariwisata maupun pengunjung dan masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan objek wisata pemancingan nusantara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Keberagaman objek wisata alam yaitu pantai bahari dengan wisata memancingnya yang masih memiliki keaslian dan memiliki potensi-potensi yang bersumber dari alam sehingga dapat menghasilkan sumber ekonomis bagi masyarakat sekitar objek wisata. Didukung dengan adanya sensasi memancing ditengah laut yang menambah daya tarik bagi pengunjung atau wisatawan untuk datang dan berkunjung ke objek wisata Pemancingan Nusantara tersebut.
- b. Pemandangan yang indah dan nyaman, pemandangan objek wisata yang menampilkan hamparan laut lepas ke perairan selat makasar, kemudian adanya hutan mangrove dan tempat pengembangbiakan rumput laut.
- c. kekayaan flora dan fauna, ini yang menjadi produk utama dari objek wisata pemancingan nusantara yaitu sebagai spot pemancingan di tengah laut dengan adanya berbagai macam fauna laut yang ada tidak terbatas hanya pada berbagai macam jenis ikan tetapi juga adanya ubur-ubur putih yang sering menampakkan dirinya dipermukaan laut secara bergerombolan pada sore hari. Kemudian kekayaan flora dipinggir pantai yang merupakan hutan mangrove yang sengaja di lestarikan oleh pemerintah sebagai pengontrol abrasi pantai. Selain itu, adanya rumput laut coklat yang dikembangbiakan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu komoditi hasil laut masyarakat setempat yang merupakan sumber pendapatan mereka.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya anggaran dana yang diperlukan dalam proses pengelolaan
- b. Belum adanya peraturan daerah tentang retribusi yang harus dilakukan sehingga semua objek wisata yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada dikenakan retribusi bagi pengunjung.
- c. Masih kurangnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan pengelolaan dengan baik.
- d. Partisipasi masyarakat yang dirasa belum maksimal
- e. Kesadaran pengunjung yang masih kurang untuk tidak membuang sampah kelaut
- f. Masih minimnya informasi terkait objek wisata Pemancingan Nusantara karena promosi wisata yang belum maksimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara optimal karena mulai dari perencanaan yang kurang dalam melakukan penelitian dikarenakan sumberdaya manusia yang kurang dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan mengakibatkan

- informasi-informasi terkait dengan pengelolaan objek wisata menjadi terhambat.
2. Pelaksanaan pemeliharaan Objek wisata juga belum optimal dikarenakan tidak adanya Juru Pelihara atau JUPEL yang bertugas untuk pengawasan objek wisata, sehingga tidak ada laporan bulanan maupun tahunan yang dilakukan.
 3. Pengawasan objek wisata harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah, dinas, maupun masyarakat. Kemudian juga masih terkendala dengan anggaran yang terbatas, sehingga belum berjalan dengan optimal.
 4. Faktor pendukung pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara yaitu kekayaan sumberdaya alam yang masih asri ditambah dengan kekayaan flora dan fauna yang ada serta adanya sensasi memancing ditengah laut merupakan daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh wisatawan.
 5. Faktor penghambat pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara yaitu anggaran yang terbatas, perda yang belum ada dan sumberdaya manusia yang belum memadai sehingga belum dapat berjalan secara optimal, kurangnya partisipasi masyarakat dan promosi wisata masih menjadi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saran

1. Agar pengelolaan objek wisata yang terhambat oleh sumberdaya manusia dapat diatasi maka, diharapkan dinas pariwisata dapat mengelola manajemen sumberdaya manusia lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya peningkatan sumberdaya manusia seperti melakukan pelatihan dan perekrutan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang bagus dan ahli dibidangnya.
2. Agar pemeliharaan terhadap objek wisata Pemancingan Nusantara berjalan dengan baik maka perlu adanya juru pelihata sehingga, bila ada kerusakan dapat segera diadakan perbaikan dan pemeliharaan objek wisata dengan cepat dan tepat.
3. Perlu adanya peningkatan kepedulian baik dari pemerintah, dinas maupun masyarakat dalam pengawasan objek wisata Pemancingan Nusantara agar objek wisata tersebut dapat memberikan keindahan pemandangan alam yang asri.
4. Agar lebih optimal Objek wisata Pemancingan Nusantara harus dijaga kelestarian flora dan fauna yang ada, sehingga tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan.
5. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah daerah terhadap anggaran untuk mengelola objek wisata Pemancingan Nusantara, dengan membuat peraturan daerah yang mendukung untuk kemajuan dan perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti dibuat peraturan tentang retribusi untuk objek wisata yang ada sehingga adanya kontribusi pendapatan untuk

perkembangan dan kemajuan objek wisata tersebut khususnya dan kemajuan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya.

Daftar Pustaka

- Aditya, Ardian Prayoga. 2010. *Studi tentang Pengelolaan Potensi Objek Wisata Pulau Derawan Kabupaten Berau oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Berau. Skripsi tidak diterbitkan*. Samarinda: : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Miles, Matthew. B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda.
- Nagib, Laila, dkk. 2003. *Kualitas SDM Pariwisata*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Solihin, Ismail. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 54 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara